

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap pembangunan negara dapat dipastikan mempunyai arah serupa untuk dapat menyejahterakan masyarakatnya yang diupayakan dengan memperkuat perekonomiannya. Pembangunan sebagai alat negara dalam mencapai tujuannya dengan melakukan perubahan untuk mendorong kinerja perekonomian dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan sehingga penduduk memiliki kesejahteraan hidup dengan terbukanya lapangan usaha yang luas dan terjadinya pemerataan pendapatan. Pembangunan bukanlah sekedar memberikan perhatian atas perekonomian semata tetapi lebih dari itu yakni dengan memperhatikan dan fokus kepada angka penduduk miskin hingga ke sudut-sudut daerah terkecil. Pembangunan ekonomi menjadi agenda penting yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya (Suripto & Subaylil, 2020). Faktanya, sejauh ini upaya yang telah dikerjakan oleh pemerintah dalam pembangunan khususnya di negara berkembang belum sepenuhnya menekan tingginya jumlah penduduk miskin di dunia.

Kemiskinan telah menjadi fenomena umum dalam permasalahan sosial yang bersifat global dan dialami oleh seluruh negara di dunia. Kemiskinan disebut sebagai permasalahan yang bersifat multidimensional karena penyebabnya berkaitan dengan berbagai dimensi kehidupan seperti tingkat pendidikan yang rendah, pemenuhan standar derajat kesehatan

yang masih kurang, distribusi pendapatan yang tidak sama rata, dan lainnya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan kemiskinan haruslah menyeluruh dan mencakup berbagai dimensi kehidupan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan baru dari satu atau beberapa dimensi kehidupan. Dengan kondisi yang kompleks tersebut menjadikan permasalahan kemiskinan sebagai isu penting sehingga kinerja pemerintah berfokus dalam mengentas kemiskinan secara menyeluruh dengan strategi yang digarap secara sistematis dan komprehensif mencakup beragam aspek kehidupan (Apriliana et al., 2021). Keberadaan program pemerintah dalam mengentas kemiskinan telah menjadi tujuan pokok pembangunan dan sebagai salah satu kriteria dalam menilai efektivitas proyek pembangunan suatu daerah. Sejalan dengan gagasan yang dikeluarkan oleh Keynes bahwa intervensi pemerintah memiliki peranan penting dalam mengatasi persoalan kemiskinan.

Kemiskinan muncul atas ketidaksanggupan individu secara finansial untuk mencukupi berbagai kebutuhan dasar seperti pangan dan non-pangan yang dianggap sebagai minimum standar hidup tertentu untuk tetap bertahan hidup dan membangun kehidupan yang bermartabat (Asri, 2023). Ketidakmampuan tersebut dilatarbelakangi kurangnya tingkat pendapatan yang diperoleh sehingga tidak memiliki sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Penduduk yang memiliki pengeluaran rata-rata per kapita bulannya berada di bawah garis kemiskinan merupakan ciri dari penduduk kategori miskin sehingga mereka dianggap tidak mampu dari segi ekonomi guna memenuhi

kebutuhan dasarnya yang tercermin dari rendahnya pengeluaran untuk melakukan konsumsi (Ali, 2023). Garis kemiskinan merupakan nilai perolehan yang diukur dengan menghitung jumlah dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Pendapatan yang diperoleh seseorang mencerminkan standar hidup masyarakat maka dapat dikatakan bahwa perolehan pendapatan dapat mengukur seberapa besar kesejahteraan yang dimiliki oleh individu. Pada prinsipnya, standar minimum hidup masyarakat tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan. Lebih dari itu, kebutuhan akan kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan tidak kalah penting. Peran kesehatan dan pendidikan sangat vital dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, tempat tinggal yang layak menjadi bagian dari kebutuhan primer yang berfungsi sebagai tempat hunian individu.

Permasalahan kemiskinan menjadi persoalan pelik yang dirasakan sejak lama dan tiada hentinya oleh masyarakat dunia terlebih pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, semasa perkembangan perekonomian. Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya menjadikan Indonesia nomer 4 di dunia sebagai Negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi mencapai 278,8 juta jiwa pada tahun 2023 (BPS, 2023). Membandingkan dengan tahun sebelumnya, besaran jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 1,1 persen dari 275,7 juta jiwa. Kemiskinan di Indonesia masih tergolong cukup tinggi ditengah padatnya jumlah penduduk yang ada, dimana per Maret 2023 tingkat kemiskinan sebesar 9,36 persen tersebar di perkotaan sebesar 7,29 persen dan di

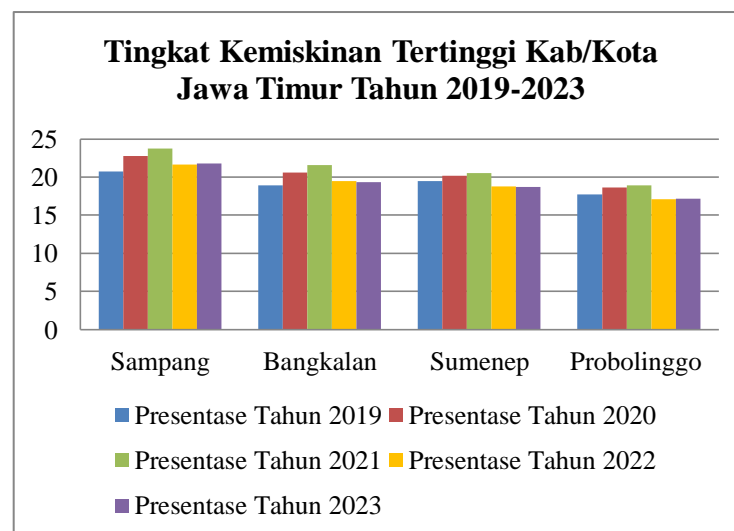
pedesaan sebesar 1,22 persen atau sebanyak 25,90 juta jiwa masyarakat Indonesia termasuk ke dalam penduduk miskin (BPS, 2023).

BPS melansir kemiskinan di Indonesia pada Maret tahun 2023 menunjukkan bahwa Pulau Jawa memposisikan diri sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin yang menghuni Pulau Jawa sebanyak 13,62 juta orang dengan presentase berada diangka 8,79 persen. Pulau Jawa sebagai satu dari 5 pulau terbesar di Indonesia yang terbentuk dari 6 provinsi di dalamnya dengan beragam perbedaan karakteristik setiap wilayahnya. Perbedaan karakteristik baik letak geografis, potensi wilayah, maupun sumber daya manusianya akan menciptakan pola pembangunan perekonomian yang berbeda dengan wilayah lainnya sehingga akan terjadi ketidakseragaman kemampuan khususnya dari aspek ekonomi. Perbedaan kemampuan dari aspek ekonomi pada akhirnya akan menimbulkan ketimpangan pendapatan yang menyebabkan adanya wilayah yang lebih unggul dan tertinggal sehingga menciptakan persoalan kemiskinan.

Upaya pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan pemerintah setempat sangat berdampak pada tinggi rendahnya kemiskinan di wilayah yang bersangkutan. Hingga Maret tahun 2023, BPS Provinsi Jawa Timur merilis bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu dari 6 wilayah provinsi di Pulau Jawa yang mempunyai tingkat kemiskinan tergolong tinggi menempati peringkat ketiga sesudah Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tingkat Kemiskinan Jawa Timur tahun 2023 mencapai 10,35 persen atau sebanyak 4.189 juta orang

dinyatakan sebagai penduduk miskin. Presentase tersebut menurun 0,14 persen jika dibandingkan terhadap presentase bulan September tahun sebelumnya yakni 2022. Penduduk miskin tersebut tersebar di perkotaan dengan presentase sebesar 7,50 persen dengan jumlah 1.703 juta orang yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,78 persen atau 1.752 juta penduduk miskin. Sementara itu, kondisi berbeda dialami oleh penduduk miskin di pedesaan dikarenakan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 13,90 persen dengan jumlah 2.484 juta jiwa pada tahun 2022 naik menjadi 13,98 atau 2.485 juta jiwa pada tahun 2023.

**Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Tertinggi Kab/Kota Jawa Timur**



Sumber : BPS Jawa Timur, 2024

Ditinjau Gambar 1.1, diketahui wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi selama lima tahun terakhir yakni Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Probolinggo. Dari keempat wilayah yang digambarkan, sebanyak tiga kabupaten

merupakan wilayah yang berada di Pulau Madura yakni Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep yang menempati posisi tiga teratas dengan peringkat tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur sepanjang lima tahun terakhir. Dimulai dari Kabupaten Sampang, kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur menduduki peringkat teratas. Kemiskinan Kabupaten Sampang mengalami fluktuasi sejak 2019, akan tetapi cenderung mengalami kenaikan. Di tahun 2023, presentase kemiskinan Kabupaten Sampang sebesar 21,76 persen dimana nilai ini naik 0,15 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selama lima tahun terakhir, puncak kemiskinan Kabupaten Sampang terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 23,76 persen atau sebanyak 237,23 ribu jiwa penduduk miskin di daerah tersebut. Berbeda dengan Kabupaten Sampang, presentase kemiskinan Kabupaten bangkalan justru mengalami penurunan 0,14 persen di tahun 2023 menjadi 19,35 persen. Meskipun demikian, presentase tersebut tetap memposisikan kabupaten ini menempati peringkat kedua sebagai wilayah kategori tingkat kemiskinan paling tinggi di Jawa Timur. Sama halnya dengan kabupaten sebelumnya, presentase kemiskinan Kabupaten Sumenep menurun pada tahun 2023 sebanyak 0,6 yaitu menjadi 18,70 persen. Meskipun menurun presentase tersebut masih termasuk ke dalam wilayah dengan kemiskinan terekstrem ketiga di Jawa Timur.

Kemiskinan ekstrem yang dirasakan oleh tiga kabupaten di Pulau Madura ini dilatarbelakangi masih banyaknya penduduk yang memperoleh pendapatan yang rendah bahkan mendekati garis kemiskinan yang pada

akhirnya menyebabkan kurang terpenuhinya secara maksimal kebutuhan yang mereka perlukan lainnya seperti kesehatan maupun pendidikan. Pendapatan yang diperoleh masyarakat tersebut hanya mampu digunakan mencukupi kebutuhan hariannya dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Keberadaan penduduk miskin di Pulau Madura yang relatif tinggi mencerminkan tidak efektifnya beragam program kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah dalam mengentas kemiskinan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat miskin daerahnya (Indrasetianingsih & Wasik, 2020). Salah satu pembangunan terbesar yang ada di Pulau Madura adalah terbangunnya jembatan penghubung Kota Surabaya dan Pulau Madura yaitu jembatan Suramadu untuk mendukung tumbuhnya perekonomian, akan tetapi pada kenyatannya manfaat pembangunan tersebut belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat sekitar karena pembangunan yang terjadi belum merata dan menyeluruh dimana hanya bagian sekitar jembatan yang memperoleh dampak lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah yang berjarak cukup jauh dari jembatan Suramadu.

Perkembangan kemiskinan Kabupaten Probolinggo menunjukkan trend meningkat selama waktu lima tahun terakhir ini. Kemiskinan yang cenderung tinggi terjadi dialami oleh masyarakat yang berada di daerah pertanian yakni berprofesi sebagai buruh tani dimana sektor pertanian rentan terhadap situasi perekonomian yang cenderung fluktuatif. Padahal, disisi lain kabupaten ini memiliki berbagai potensi yang dapat diberikan pengembangan dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk bisa

menaikkan taraf kehidupan sosial khususnya bagi masyarakat daerah tersebut. Kemiskinan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 menempati peringkat ke-empat sebagai kabupaten dengan kemiskinan terekstrem dibuktikan dengan persentasenya mencapai 17,19 persen sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai ini menghadapi kenaikan sebesar 0,8 persen. Meskipun tidak terlalu tinggi jumlah kenaikannya akan tetapi masih memposisikan kabupaten ini sebagai daerah dengan kemiskinan terekstrem di Jawa Timur pada peringkat ke-empat terhitung sejak lima tahun terakhir yakni tahun 2019 hingga 2023. Jika dilihat trend garis kemiskinan pada grafik gambar 1.1, kemiskinan dalam lima tahun terakhir yang dialami keempat kabupaten mengalami puncaknya pada tahun 2021. Salah satu penyebabnya yaitu perekonomian Negara mengalami krisis atas terjadinya pandemi Covid-19 sehingga situasi ini mengurangi kemampuan rumah tangga mencukupi kebutuhannya hariannya diakibatkan terbatasnya aktivitas masyarakat menjalankan pekerjaannya atas pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah.

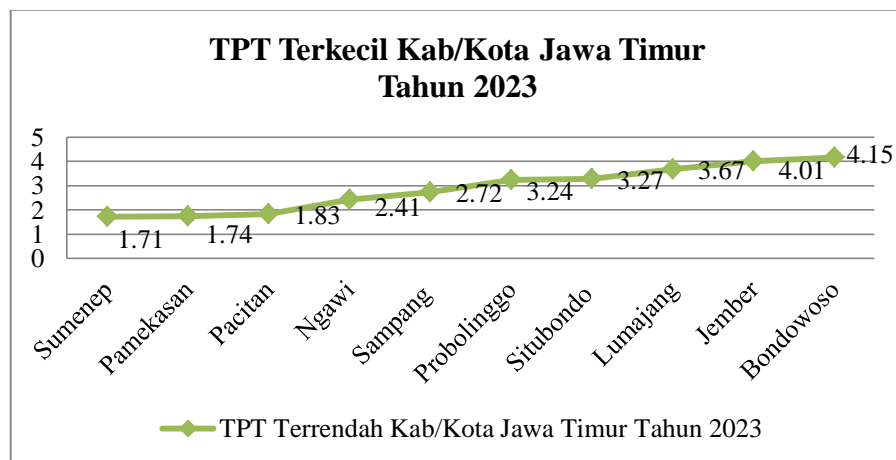
Pendapatan menjadi suatu unsur penting yang dimanfaatkan untuk menentukan kesejahteraan masyarakat, maka semakin perolehannya tinggi maka kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi pula. Terwujudnya tingkat pemanfaatan tenaga kerja yang penuh waktu (*full employment*) akan berimbang terhadap tercapainya perolehan pendapatan secara maksimum oleh masyarakat. Apabila kondisi penduduk menganggur maka tidak adanya upah yang diterima ataupun diperoleh untuk mengatasi



masalah sehari-hari terlebih mengenai pemenuhan kebutuhan pokok sehingga tingkat kesejahteraan kehidupan penduduk mengalami penurunan. Menurunnya tingkat kesejahteraan yang terjadi secara terus menerus tentu akan menimbulkan terciptanya kondisi kemiskinan atau semakin banyaknya jumlah penduduk miskin.

Didefinisikan oleh BPS (2023) penduduk tidak mempunyai suatu pekerjaan, tetapi aktif mencari kesempatan kerja ataupun sedang merancang untuk memulai bisnis baru dan penduduk yang telah diterima kerja namun masih dalam proses menunggu hari mulai kerja disebut pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka diketahui sebagai presentase dari jumlah penduduk menganggur terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja yang menunjukkan jumlah pengangguran per seratus penduduk dalam klasifikasi angkatan kerja (BPS, 2023). Perekonomian dapat terganggu stabilitasnya akibat adanya pengangguran, khususnya perekonomian nasional Indonesia.

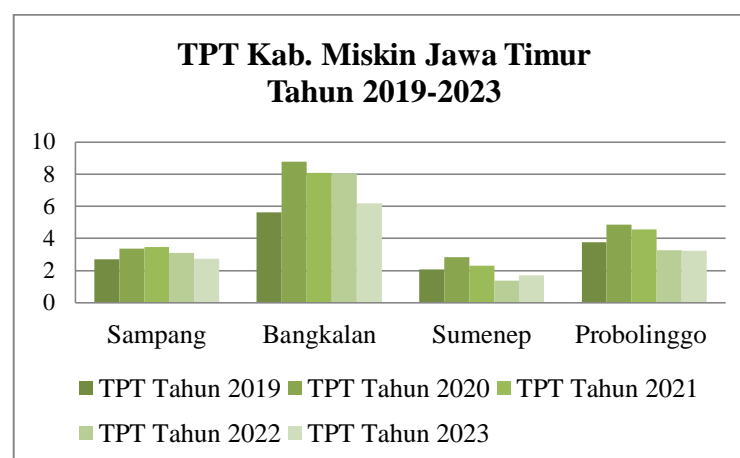
**Gambar 1. 2 TPT Terkecil Kab/Kota Jawa Timur**



Sumber : BPS Jatim, 2023

Berdasarkan gambar 1.2, menunjukkan pada tahun 2023, 10 kabupaten dengan nilai TPT terendah secara urut dimiliki oleh Kabupaten Sumenep (1,71%), Kabupaten Pamekasan (1,74%), Kabupaten Pacitan (1,83%), Kabupaten Ngawi (2,41%), Kabupaten Sampang (2,72%), Kabupaten Probolinggo (3,24%), Kabupaten Situbondo (3,27%), Kabupaten Lumajang (3,67%), Kabupaten Jember (4,01%), dan Kabupaten Bondowoso (4,15%). Berdasarkan objek penelitian ini, terdapat 3 kabupaten yang tercantum sebagai kabupaten dengan nilai TPT terkecil di Jawa Timur yakni Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Probolinggo. Akan tetapi, presentase kemiskinan kabupaten tersebut masuk sebagai kabupaten dengan kemiskinan terekstrem di Jawa Timur. Jika tingkat pengangguran tergolong rendah akan berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kemiskinan dikarenakan masyarakat memiliki pekerjaan dan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaannya sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hariannya untuk bertahan hidup (Sari & Putri, 2022).

**Gambar 1. 3 TPT Kabupaten Miskin Jawa Timur**



Sumber : BPS Jatim, 2023

Gambar 1.3 menggambarkan TPT kabupaten miskin terekstrem mengalami fluktuasi selama kurun waktu lima tahun terakhir. Presentase TPT keempat kabupaten pada tahun 2023 diketahui cenderung menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2022. Presentase TPT Kabupaten Sampang turun menjadi 2,72 persen, Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan menjadi 6,18 persen, dan Kabupaten Probolinggo turun hingga menjadi 3,24 persen. Kondisi berbeda dialami oleh Kabupaten Sumenep bahwa pada tahun 2023 presentase TPTnya justru mengalami kenaikan. Meskipun mengalami kenaikan, Kabupaten Sumenep berhasil menjadi daerah miskin ekstrem yang memiliki nilai TPT terkecil dibanding empat kabupaten miskin ekstrem lainnya selama periode tahun 2019-2023. TPT Kabupaten Sumenep tahun 2023 sebesar 1,71 persen cenderung rendah dan menempati peringkat pertama sebagai kabupaten dengan nilai TPT terendah di Jawa Timur. Sepanjang periode tersebut, presentase pengangguran tertinggi yang dialami Kabupaten Sumenep hanya mencapai 2,84 persen yang terjadi pada tahun 2020.

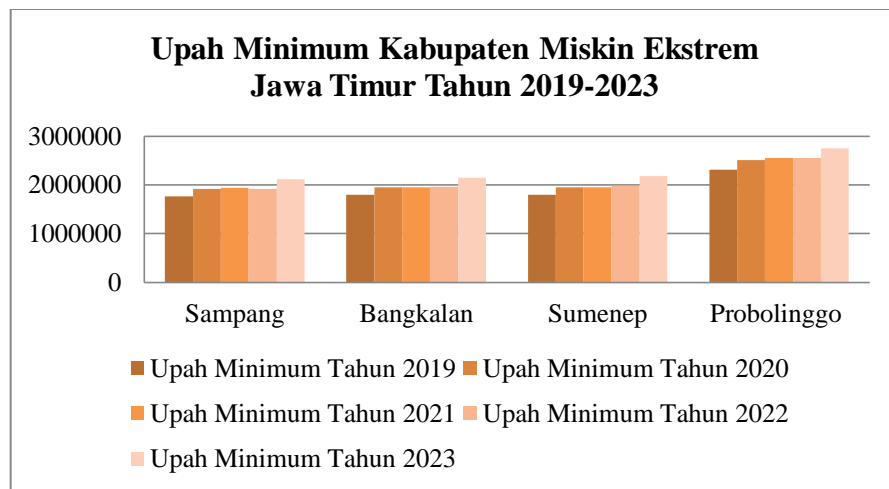
Trend garis TPT berdasarkan grafik gambar 1.3 juga dapat diketahui bahwa Kabupaten Bangkalan menjadi daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi tidak hanya pada tahun 2023 melainkan juga tahun-tahun sebelumnya. Sebagai gerbang daerah Pulau Madura dengan memiliki akses termudah menghubungkan Pulau Madura dengan daerah kabupaten atau kota lainnya menjadikan Kabupaten Bangkalan termasuk sebagai daerah rujukan bagi masyarakat perantauan untuk mencari pekerjaan. Itulah mengapa Kabupaten Bangkalan memiliki jumlah

penduduk yang menganggur lebih tinggi. Terlebih lagi Kabupaten Bangkalan berdekatan langsung dengan Ibu Kota Jawa Timur yakni Kota Surabaya yang juga sebagai salah satu kota besar dalam menjadi daerah tujuan masyarakat perantauan untuk memperoleh pekerjaan. Kota Surabaya dan Pulau Madura dihubungkan oleh Jembatan Suramadu yang dikenal sebagai jembatan terpanjang di Indonesia terhitung hingga saat ini. TPT yang tinggi berkontribusi menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Angkatan kerja yang melimpah tanpa disertai ketersediaan lapangan kerja yang seimbang menjadi penyebab lain terjadi banyaknya tingkat pengangguran. Ketersediaan angkatan kerja yang melimpah menjadi salah satu mesin bagi pertumbuhan ekonomi yang berarti banyak ketersediaan produktivitas tenaga kerja guna menciptakan barang dan jasa. Produktivitas tenaga kerja akan diberikan timbal balik berupa upah oleh konsumen, upah tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh atas hasil barang atau jasa yang diberikan. Upah yang diberikan oleh perusahaan sangat memberikan dampak terhadap kehidupan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan penting merumuskan dan menetapkan kebijakan upah minimum untuk menghindari pemberian upah yang tidak manusiawi atau jauh dibawah yang seharusnya sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan. Penetapan kebijakan upah minimum Kabupaten berfungsi melindungi para pekerja dari kesewenangan perusahaan. Tujuan lainnya tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, menegaskan

agar tidak terjadi kemerosotan upah pada tingkat terendah sebagai akibat dari ketidakseimbangan pasar maka diperlukan penetapan upah minimum sebagai pelindung pekerja atau buruh sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebijakan upah yang tetap mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

**Gambar 1. 4 UMK Kabupaten Miskin Jawa Timur**



Sumber : BPS, 2023

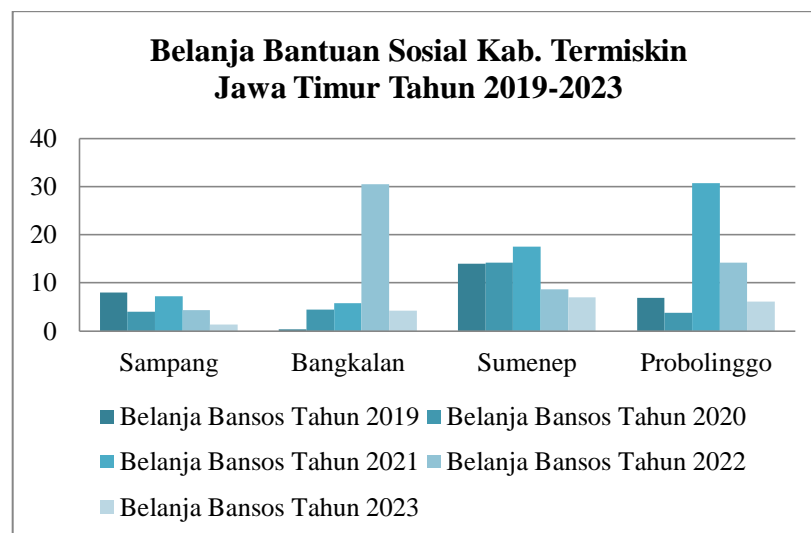
Diketahui dari grafik data pada gambar 1.4 di atas, upah minimum Kabupaten keempat kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi Jawa Timur secara konsisten mengalami trend peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tahun 2023 menjadi peningkatan tertinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Upah minimum daerah dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut. Upah minimum Kabupaten Kabupaten Sampang senilai Rp2.114.335,27, Kabupaten Bangkalan senilai Rp2.152.450,83, Kabupaten Sumenep senilai Rp2.176.820,94, dan Kabupaten Probolinggo senilai Rp2.753.266,95. Dari ke empat daerah tersebut, upah minimum Kabupaten tertinggi tahun 2023 dimiliki oleh Kabupaten Probolinggo.

Kebijakan fiskal menjadi bukti lainnya bahwa pemerintah memiliki peranan penting untuk mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga kestabilannya sehingga perwujudan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Melalui peran tersebut, negara telah memenuhi hak masyarakat agar tidak mengalami pengangguran dan berakibat pada kondisi yang miskin (Sumiyarti, 2022). Menurut pandangan makro, kebijakan fiskal meliputi tindakan terkait sistem perpajakan dan anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal di Indonesia tercermin adanya pengelolaan keuangan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah memiliki urgensi yang tinggi dalam merencanakan pembangunan daerah.

Sebagai bentuk tanggung jawabnya, dalam upaya mengentas kemiskinan pemerintah merumuskan suatu kebijakan tentang program menanggulangi kemiskinan seperti yang tercantum pada Peraturan presiden Republik Indonesia No. 166 Tahun 2014 (Rarun, et. al., 2018). Agar tujuan program mengentas kemiskinan dapat dicapai, dibutuhkan pendanaan yang berpangkal dari anggaran pemerintah pusat, anggaran pemerintah daerah, maupun sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan. Semakin besar dan tepat dalam mengalokasikan pengeluaran daerah diharapkan mampu memberikan dampak dalam peningkatan perekonomian sehingga kemiskinan dapat diatasi atas tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan penanggulangan permasalahan kemiskinan, belanja Bantuan Sosial memiliki keterkaitan secara langsung sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah mengatasi kemiskinan. Bantuan Sosial disalurkan kepada masyarakat miskin bersyarat yang artinya bersifat selektif. Bantuan tersebut dapat berbentuk uang secara tunai maupun barang dengan tujuan dapat memberikan perlindungan terjadinya risiko sosial yang dialami masyarakat.

**Gambar 1. 5 Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Miskin Jawa Timur**



Sumber : DJPK Kemenkeu, 2024

Grafik pada gambar 1.5 merupakan data yang bersumber dari publikasi laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa data pengeluaran keempat pemerintah daerah dalam pemberian bantuan sosial setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 besaran realisasi belanja pemerintah dalam memberikan bantuan sosial mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut, realisasi belanja bantuan sosial masing

masing kabupaten mencapai yakni Kabupaten Sampang mencapai 72,66% yaitu sebesar 1,33 miliar dari anggaran yang direncanakan dalam APBD daerahnya sebesar 1,83 miliar. Realisasi Kabupaten Bangkalan hampir mencapai keseluruhan anggaran yakni sebesar 92,71 persen setara dengan 4,18 miliar dari dana yang dianggarkan senilai 4,51 persen. Sementara itu, realisasi bantuan sosial Kabupaten Sumenep hanya mencapai 55,80 persen setara 6,97 miliar dari dana anggaran 12,50 miliar dan realisasi belanja bantuan sosial Kabupaten Probolinggo sebesar 83,89 persen atau 6,16 miliar dari anggaran yang ditetapkan senilai 7,35 miliar. Meskipun presentase capaian Kabupaten Sumenep dalam merealisasikan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat lebih kecil, akan tetapi anggaran yang direncanakan oleh Kabupaten Sumenep jauh lebih besar dibandingkan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan bahwa sepanjang lima tahun terakhir dimana terhitung sejak tahun 2019 hingga 2023 kemiskinan ekstrem terjadi di empat kabupaten Provinsi Jawa Timur secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melaksanakan penelitian terkait topik dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten, dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Probolinggo”.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan dari permasalahan yang diterangkan di latar belakang sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah untuk dapat diteliti, antara lain :

1. Apakah terdapat pengaruh antara Tingkat Penganguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Upah Minimum Kabupaten terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Belanja Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian dilakukan memiliki tujuan mencakup pada hal-hal berikut, antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Penganguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Probolinggo.

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Probolinggo.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Probolinggo.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Guna tersusunnya penelitian yang terfokus dan terarah maka penulis perlu mempersempit cakupan penelitian sehingga mencegah pembahasan yang terlalu luas bahwa penelitian yang dilakukan mencakup data selama periode 2011 hingga 2023 pada Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur. Pada penelitiannya penulis menggunakan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten, dan Belanja Bantuan Sosial sebagai variabel independen. Sementara itu, variabel dependen yang digunakan yakni Tingkat Kemiskinan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1.5.1 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pemerintah terkhusus pemerintah kabupaten sebagai daerah kemiskinan terekstrem di Jawa Timur yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten

Bangkalan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Probolinggo dalam merumuskan strategi kebijakan untuk meminimalkan permasalahan kemiskinan daerah.

### **1.5.2 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian mampu dipergunakan sebagai sumber rujukan pengembangan keilmuan pada penelitian selanjutnya dengan topik yang relevan dengan kajian pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten, dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan.